ABSTRAK

IKHSAN SETIADI, NPM. 2022465: Judul **"PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DI KECAMATAN PARINGIN KOTA KABUPATEN BALANGAN".** Dibimbing oleh Bapak **Arif Budiman, S.Sos., M.AP** sebagai Pembimbing I dan Ibu Mahdalina, S.Pd.I.,M.Pd Sebagai Pembimbing II

Peran Dinas Perhubungan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas sangatlah penting, permasalahannya adalah Rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat, Masih ditemukannya beberapa titik kemacetan yang tidak dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang memadai dan Koordinasi antarinstansi terkait seringkali belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode penelitian menggunakan metode deskriftif kualitatif. Sumber data diambil melalui penarikan secara *Snowball sampling* berjumlah 11 orang, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data antara lain perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, dan mengadakan *membercheck*.

Hasil penelitian kurang baik, hal ini dapat dilihat dari indikator penuyusunan dan penerapan kebijakan sudah baik penerapan kebijakan diatur melalui pengaturan lalu lintas. Indikator sosialisasi peraturan lalu lintas kepada masyarakat kurang baik masyarakat belum memahami. Indikator penegakan aturan terhadap pelanggaran lalu lintas kurang baik banyak masyarakat melakukan pelanggaran. Indikator pemberian sanksi kepada pelanggar kurang baik karena belum memberikan efek jera. Indikator kejelasan aturan dan rambu lalu lintas di lapangan kurang baik beberapa rambu yang sulit dilihat. Indikator pelaksanaan sosialisasi dan edukasi keselamatan lalu lintas sudah baik instansi memberikan informasi mengenai aturan dan tata tertib berlalu lintas. Indikator intensitas penyuluhan kepada masyarakat sudah baik kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara rutin. Indikator upaya meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas kurang baik kepatuhan masyarakat rendah. Indikator keterlibatan masyarakat dalam mendukung tertib lalu lintas kurang baik pengguna jalan tidak mematuhi. Indikator perubahan perilaku masyarakat setelah sosialisasi kurang baik pengguna jalan yang melanggar aturan berlalu lintas. Indikator ketersediaan rambu lalu lintas kurang baik persimpangan jalan tidak dilengkapi rambu peringatan maupun petunjuk arah. Indikator kelengkapan marka jalan kurang baik yang mana masih banyak ruas jalan yang sudah pudar. Indikator penyediaan lampu lalu lintas kurang baik yang mana belum dilengkapi traffic light. Indikator kondisi dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas sudah baik yang mana fasilitas yang. Indikator penempatan fasilitas di titik rawan pelanggaran/kemacetan kurang baik banyak lokasi strategis kurang jelas. Faktor penghambat adalah kurangnya frekuensi program edukasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keselamatan, banyak yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan beberapa rambu yang sulit dilihat. sedangkan faktor pendukung adalah kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penyampaian informasi.

Disarankan Kepada Kepala Dinas Perhubungan diharapkan dapat meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas melalui penyuluhan. Pegawai Dinas Perhubungan diharapkan dapat bekerja lebih aktif dalam melakukan pengawasan, pemeliharaan fasilitas lalu lintas, serta memberikan pelayanan informasi yang rutin kepada masyarakat dan Polisi Lalu Lintas (Polantas) diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum secara tegas namun tetap humanis terhadap pelanggaran lalu lintas, terutama bagi pelanggar berulang.

ABSTRACT

IKHSAN SETIADI, NPM. 2022465: *Title: "**THE ROLE OF THE TRANSPORTATION DEPARTMENT IN TRAFFIC MANAGEMENT IN PARINGIN DISTRICT, BALANGAN REGENCY.**" Supervised by Mr. **Arif Budiman, S.Sos., M.AP.** as Supervisor I and Ms. **Mahdalina, S.Pd.I., M.Pd.** as Supervisor II.*

The role of the Transportation Department in reducing traffic violations is crucial. The problems include low public awareness and discipline, the continued lack of adequate traffic signs in several congestion points, and suboptimal coordination between relevant agencies. The purpose of this study was to determine the role of the Transportation Department in traffic management in Paringin District, Balangan Regency, and the factors influencing it.

The research method used was descriptive qualitative. Data were collected through snowball sampling of 11 participants, with observation, interviews, and documentation as data collection techniques. After the data was collected, it was analyzed using techniques including data reduction, data presentation, and data verification or conclusion drawing. Data credibility tests included extended observation, increased diligence, triangulation, negative case analysis, and member checking.

The research results were less than satisfactory, as evidenced by the indicators: policy formulation and implementation were good, with policy implementation regulated through traffic regulations. The indicator for disseminating traffic regulations to the public was less than satisfactory. The indicator for enforcing traffic violations was less than satisfactory, with many violators. The indicator for imposing sanctions on violators was less than satisfactory because they did not provide a deterrent effect. The indicator for clarity of traffic rules and signs in the field was less than satisfactory, with some signs difficult to see. The indicator for implementation of traffic safety education and socialization was good, with agencies providing information on traffic rules and regulations. The indicator for intensity of public outreach was good, with outreach activities being carried out routinely. The indicator for efforts to increase traffic awareness and discipline was less than satisfactory, with public compliance being low. The indicator for community involvement in supporting traffic order was less than satisfactory, with road users not complying. The indicator for changes in public behavior after outreach was less than satisfactory, with road users violating traffic rules. Indicators of inadequate traffic sign availability include intersections lacking warning signs or directional signs. Indicators of inadequate road markings, with many sections of road still faded. Indicators of inadequate traffic light provision, with many lacking traffic lights. Indicators of adequate traffic facility condition and maintenance include which facilities are available. Indicators of inadequate facility placement at points prone to violations/congestion, with many strategic locations unclear. Inhibiting factors include the lack of frequency of educational programs, low public awareness of traffic regulations, the widespread disobedience of traffic rules, and the difficulty of seeing some signs. Supporting factors include policies tailored to community needs and the dissemination of information.

Recommendations: The Head of the Transportation Agency is expected to improve public awareness programs regarding the importance of orderly traffic through outreach. Transportation Agency employees are expected to work more actively in monitoring and maintaining traffic facilities, as well as providing routine information services to the public. Traffic Police (Polantas) are expected to increase firm but humane law enforcement against traffic violations, especially repeat offenders.